



BANK PERKREDITAN RAKYAT
MITRA BALI ARTHA MANDIRI
Mitra Usaha Anda

JIN. JENDRAL SUDIRMAN 112
AMLAPURA - BALI
TELP. (0363) 21309

No. 020.II/MBAM/2023/KL

Amlapura, 09 Februari 2023

Kepada Yth.

DPP Perbarindo Pusat dan Media BPR

Komp. Patra II No. 46

Jl. Jend. Ahmad Yani

Bypass Cempaka Putih – Jakarta Pusat 10510

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2022

Menunjuk POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola, bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri tahun 2022

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

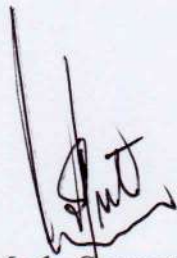
Hormat kami



I Putu Darmawan
Direktur Utama

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR MITRA BALI ARTHA MANDIRI TAHUN 2022

Amlapura, 16 Januari 2023



I Made Sumatra
Komisaris Utama



I Putu Darmawan
Direktur Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri
Posisi Laporan : 31 Desember 2022
Alamat : JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 112 AMLAPURA, KEC.
KARANGASEM, KAB. KARANGASEM, PROVINSI BALI
Nomor Telepon : (0363)-21309
Penjelasan Umum : PENERAPAN TATA KELOLA SECARA UMUM PADA PT. BPR
MITRA BALI ARTHA MANDIRI TELAH BERJALAN DENGAN
EFEKTIF DAN EFISIEN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	I PUTU DARMAWAN	Direktur Utama	MENJALANKAN SEGALA TINDAKAN YANG BERKAITAN DENGAN KEPENGURUSAN, BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGURUSAN BPR, MEWAKILI BPR BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR PERSEROAN
2	NI WAYAN RUSTINI	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	MERUMUSKAN STRATEGI GUNA MENDORONG TERCIPTANYA BUDAYA KEPATUHAN, MENGUSULKAN KEBIJAKAN KEPATUHAN, MENETAPKAN SISTEM DAN PROSEDUR KEPATUHAN YANG DIGUNAKAN MENYUSUN KETENTUAN DAN PEDOMAN INTERNAL BPR, MELAKUKAN TINDAKAN PENCEGAHAN AGAR KEBIJAKAN DAN/ATAU KEPUTUSAN DIREKSI TIDAK MENYIMPANG DARI POJK, BI DAN PERATURAN LAIN YANG BERLAKU

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

DIREKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SELALU BERPEDOMAN PADA KETENTUAN YANG BERLAKU DAN MENINDAKLANJUTI SERTA MELAKSANAKAN SARAN DAN ARAHAN DARI DEWAN KOMISARIS UNTUK KEMAJUAN DAN PERKEMBANGAN BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	I MADE SUMATRA	Komisaris Utama	MEMBERIKAN PENGARAHAN, MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGIS BPR, PEMBERIAN REKOMENDASI TERKAIT DENGAN PEMENUHAN KETENTUAN BPR, BERSAMA DIREKSI MENINDAKLANJUTI HASIL TEMUAN AUDIT INTERN, AKUNTAN PUBLIK DAN OTORITAS PERBANKAN, MEREVIEW DAN MENYETUJUI RENCANA BISNIS, MEREKOMENDASIKAN KAP
2	TOKAN	Komisaris	MEMBERIKAN PENGARAHAN, MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGIS BPR, PEMBERIAN REKOMENDASI TERKAIT DENGAN PEMENUHAN KETENTUAN BPR, BERSAMA DIREKSI MENINDAKLANJUTI HASIL TEMUAN AUDIT INTERN, AKUNTAN PUBLIK DAN OTORITAS PERBANKAN, MEREVIEW DAN MENYETUJUI RENCANA BISNIS, MEREKOMENDASIKAN KAP DAN MENGGANTIKAN KOMISARIS UTAMA BILA BERHALANGAN HADIR DALAM SEMUA KEGIATAN YANG HARUS DIHADIRI DEWAN KOMISARIS

Rekomendasi Kepada Direksi

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA, DIHARAPKAN DIREKSI SELALU BERPEDOMAN PADA POJK DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG RELEVAN DAN TERUS MENGEMBANGKAN SERTA MENINGKATKAN KEMAMPUAN DALAM USAHA MEMAJUKAN BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	I PUTU DARMAWAN	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2	NI WAYAN RUSTINI	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

DIREKSI BPR TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS MAUPUN PEMEGANG SAHAM BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	I PUTU DARMAWAN	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2	NI WAYAN RUSTINI	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

DIREKSI BPR TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS MAUPUN PEMEGANG SAHAM BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I MADE SUMATRA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2	TOKAN	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA DEWAN KOMISARIS BPR DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DIREKSI MAUPUN PEMEGANG SAHAM BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I MADE SUMATRA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2	TOKAN	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DIREKSI MAUPUN PEMEGANG SAHAM BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	242568746	2	99987250
2	Tunjangan	2	45000000	2	22200000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		287568746		122187250

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TERGANTUNG DARI PENCAPAIAN JUMLAH ASET DAN DENGAN PERSETUJUAN RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	TIDAK ADA	TIDAK ADA
2	Transportasi	1 UNIT SEPEDA MOTOR UNTUK DIREKSI YMFK DAN 1 UNIT MOBIL UNTUK DIREKTUR UTAMA	TIDAK ADA
3	Asuransi Kesehatan	BPJS KESEHATAN	TIDAK ADA
4	Fasilitas lainnya	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

SELAIN GAJI ATAU HONOR, DIREKSI MENERIMA TUNJANGAN LAIN YANG DITENTUKAN OLEH DEWAN KOMISARIS DENGAN PERSETUJUAN RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,80	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,35	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,59	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,22	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,09	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

DASAR PEMBERIAN GAJI KEPADA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ADALAH ASET, JABATAN DAN PENCAPAIAN BPR, SEDANGKAN DASAR PEMBERIAN GAJI KEPADA PEGAWAI ADALAH UMK, MASA KERJA, STATUS DAN KONDISI PERUSAHAAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	25-01-2022	4	EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DESEMBER 2021, PEMBAHASAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH, EVALUASI KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT, OPERASIONAL & APU PPT
2	20-04-2022	4	EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN MARET 2022, PEMBAHASAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH, EVALUASI KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT, OPERASIONAL & APU PPT
3	14-07-2022	4	EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN JUNI 2022, PEMBAHASAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH, EVALUASI KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT & OPERASIONAL
4	25-10-2022	4	EVALUASI KINERJA SEPTEMBER 2022, PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN UMUM OJK TAHUN 2022, EVALUASI TERHADAP KUALITAS PELAPORAN SPI, RENCANA STRATEGIS TI DAN ARAH KEBIJAKAN BPR TERKAIT PENGGUNAAN TI, PEMBAHASAN TINDAK LANJUT PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

SELAMA TAHUN 2022 PENGURUS TELAH MELAKSANAKAN RAPAT MINIMAL SEBANYAK 4 KALI SESUAI DENGAN POJK NO 4/POJK.03/2015

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	I MADE SUMATRA	4	0	100,00
2	TOKAN	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS SELAMA TAHUN 2022 DIHADIRI OLEH KEDUA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

SEPANJANG TAHUN 2022, TIDAK TERDAPAT PENYIMPANGAN INTERNAL DI BPR BAIK YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PEGAWAI TETAP ATAUPUN PEGAWAI TIDAK TETAP

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

SELAMA TAHUN 2022, TIDAK ADA PERMASALAHAN HUKUM SECARA PERDATA ATAU PIDANA YANG DIHADAPI BPR BAIK YANG BERKAITAN DENGAN PENYALAHGUNAAN KREDIT ATAUPUN SIMPANAN DANA MASYARAKAT

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Nama BPR	: PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 112 AMLAPURA, KEC. KARANGASEM, KAB. KARANGASEM, PROVINSI BALI
Nomor Telepon	: (0363)-21309
Modal Inti BPR	: 6.163.777.066,00
Total Aset BPR	: 20.221.467.554,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,2
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: PENERAPAN TATA KELOLA PADA BPR DENGAN MEMPERTIMBANGKAN 11 FAKTOR PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) SUDAH TERLAKSANA DENGAN BAIK DAN MEMADAI. DALAM HAL TERDAPAT KELEMAHAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI, BPR TERUS BERUPAYA UNTUK MEMPERBAIKI

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,40	0,14	1,04	0.208	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TELAH TERLAKSANA DENGAN BAIK
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,56	0,45	0,10	1,11	0.167	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TELAH DILAKUKAN SECARA MEMADAI DAN DEWAN KOMISARIS SECARA TERUS MENERUS TELAH MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN USAHA BPR
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	0.000
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,40	0,10	1,00	0.100	TIDAK TERDAPAT BENTURAN KEPENTINGAN YANG DAPAT MERUGIKAN BPR
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,60	0,64	0,10	1,34	0.134	UNIT KERJA KEPATUHAN INDEPENDEN TERHADAP FUNGSI OPERASIONAL DAN BPR SELALU MEMINIMALISIR PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,80	0,70	0,13	1,63	0.163	FUNGSI AUDIT INTERN PADA BPR TELAH DILAKSANAKAN SECARA MEMADAI, PE AUDIT INTERN BERSIFAT INDEPENDEN TERHADAP FUNGSI OPERASIONAL
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	DALAM RANGKA PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN, BPR TELAH MENUNJUK AKUNTAN PUBLIK SESUAI KETENTUAN YAKNI TELAH TERDAFTAR DI OJK DAN TELAH DISETUJUI OLEH RUPS GUNA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN BPR
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,67	0,57	0,15	1,39	0.139	BPR MASIH TERUS BERUPAYA MELAKUKAN PENCEGAHAN RISIKO UNTUK MEMINIMALISIR KERUGIAN BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	SELAMA TAHUN 2022, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN BMPK BAIK ITU PENEMPATAN DANA ATAU PUN PENYALURAN KREDIT
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	PENYUSUNAN RBB TELAH DISUSUN SESUAI KETENTUAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SERTA TELAH DILAPORKAN KEPADA OJK
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,40	0,10	1,50	0.113	LAPORAN TAHUNAN DAN KEUANGAN PUBLIKASI TELAH DISAMPAIKAN SECARA BERKALA, LENGKAP DAN TEPAT WAKTU SERTA TELAH DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA MASSA SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BPR
Nilai Komposit						1.2	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	MODAL INTI BPR KURANG DARI Rp. 50 MILIAR DENGAN 1 DIREKTUR UTAMA DAN 1 DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	KEDUA DIREKSI BPR TINGGAL DI KABUPATEN YANG SAMA (KARANGASEM) DAN PROVINSI YANG SAMA (BALI) DENGAN LOKASI KANTOR PUSAT BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	KEDUA DIREKSI BPR TIDAK MERANGKAP JABATAN PADA BANK, PERUSAHAAN NON BANK DAN/ATAU LEMBAGA LAIN
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	KEDUA DIREKSI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN SESAMA ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	DIREKSI TIDAK MENGGUNAKAN PENASEHAT PERORANGAN DAN/ATAU PENYEDIA JASA PROFESIONAL SEBAGAI KONSULTAN KECUALI UNTUK PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN YANG MENGGUNAKAN JASA AKUNTAN PUBLIK YANG DISETUJUI RUPS BERDASARKAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	KEDUA DIREKSI TELAH LULUS FIT AND PROPER TEST DAN DIANGKAT MELALUI RUPS SERTA PERPANJANGAN MASA JABATAN TELAH DITETAPKAN MELALUI RUPS
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB OLEH DIREKSI DILAKUKAN SECARA INDEPENDEN TANPA ADA KUASA YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PENGALIHAN TUGAS SERTA WEWENANG TANPA BATAS
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI DARI PE AUDIT INTERN, OJK ATAUPUN OTORITAS LAIN YANG BERWENANG SELALU DITINDAKLANJUTI OLEH DIREKSI
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	DIREKSI MENYAMPAIKAN DATA DAN INFORMASI YANG LENGKAP, AKURAT, TERKINI DAN TEPAT WAKTU KEPADA DEWAN KOMISARIS. INFORMASI TERSEBUT DISAMPAIKAN MELALUI RAPAT PENGURUS ATAUPUN VIA TELEPON SAAT DEWAN KOMISARIS BERHALANGAN HADIR KE KANTOR PUSAT BPR
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	KEPUTUSAN RAPAT DIREKSI DIAMBIL BERDASARKAN MUSYAWARAH MUFAKAT DENGAN TETAP MENCANTUMKAN DISSENTING OPINION BILA TERDAPAT PERBEDAAN PENDAPAT
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	DIREKSI HANYA MENERIMA REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN YANG TELAH DITETAPKAN RUPS SERTA TIDAK MEMANFAATKAN BPR UNTUK MENGAMBIL KEUNTUNGAN PRIBADI YANG DAPAT MERUGIKAN BPR
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	SELAMA TAHUN 2022 DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KUALITAS SDM, ANGGOTA DIREKSI BPR MENGIKUTSERTAKAN PEGAWAINYA DALAM BERBAGAI PELATIHAN DAN SOSIALISASI YANG DILAKSANAKAN OTORITAS TERKAIT YANG MAYORITAS DILAKUKAN SECARA DARING (ONLINE) KARENA MASIH DALAM SITUASI PANDEMI
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	DIREKSI MENGEDEPANKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM SETIAP PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	BPR MEMILIKI PEDOMAN DAN TATA TERTIB DIREKSI YANG DIGUNAKAN OLEH DIREKSI DALAM HAL PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	SETIAP PELAKSANAAN RUPS, DIREKSI MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUGAWABAN KEPADA PEMEGANG SAHAM YANG TERTUANG DALAM BERITA ACARA RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	KEBIJAKAN STRATEGIS BPR DI BIDANG KEPEGAWAIAN SELALU DIKOMUNIKASIKAN KEPADA SELURUH UNIT KERJA
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	SELAMA TAHUN 2022, SELALU TERDAPAT NOTULIS DALAM SETIAP RAPAT DIREKSI YANG MENDOKUMENTASIKAN RISALAH RAPAT DENGAN BAIK TERMASUK JIKA ADA DISSENTING OPINIONS
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	SELAMA TAHUN 2022, PERKREDITAN BPR BELUM DAPAT TUMBUH SEHUBUNGAN DENGAN BELUM BERAKHIRNYA MASA PANDEMI COVID-19 YANG MASIH BERDAMPAK PADA PENYALURAN KREDIT YANG LEBIH SELEKTIF DAN KEMAMPUAN BAYAR DARI DEBITUR YANG MENURUN, MESKIPUN DIREKSI DAN SELURUH PEGAWAI TERUS BERUSAHA UNTUK MENCAPAI HASIL YANG LEBIH BAIK
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	DIREKSI MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA KEPADA OJK, PERBARINDO DAN 1 KANTOR MEDIA ATAU MAJALAH EKONOMI DAN KEUANGAN SETIAP TAHUN
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,14	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	MODAL INTI BPR KURANG DARI Rp. 50 MILIAR DAN BPR MEMILIKI 2 ORANG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	JUMLAH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SEBANYAK 2 ORANG DAN TIDAK MELEBIHI JUMLAH ANGGOTA DIREKSI
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	SELURUH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG DIANGKAT MELALUI RUPS TELAH LULUS FIT AND PROPER TEST SERTA PERPANJANGAN MASA JABATANNYA DITETAPKAN MELALUI RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	DEWAN KOMISARIS BERTEMPAT TINGGAL DI PROVINSI YANG SAMA DENGAN LOKASI KANTOR PUSAT BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	MODAL INTI BPR KURANG DARI Rp. 50 MILIAR
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	DEWAN KOMISARIS MEMILIKI PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	KOMISARIS UTAMA MERANGKAP JABATAN PADA 1 BPR LAIN YAITU BPR MITRA BALI SRISEDANA MANDIRI
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA SAMPAI DERAJAT KEDUA DENGAN SESAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DIREKSI

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	DEWAN KOMISARIS BPR ADALAH INDEPENDEN YANG TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KEUANGAN, KELUARGA, KEPENGURUSAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI ATAUPUN DENGAN PIHAK LAIN YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEPUTUSANNYA UNTUK BERTINDAK INDEPENDEN
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,56	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TELAH DILAKUKAN DENGAN BAIK TERMASUK DALAM HAL PEMBERIAN REKOMENDASI TERKAIT DENGAN PEMENUHAN KETENTUAN BPR SEBAGAI BENTUK PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN USAHA BPR
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	DALAM MEMENUHI TUGAS PENGAWASANNYA, DEWAN KOMISARIS SELALU MEMBERI PENGARAHAN, MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGIS BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	DALAM MELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN USAHA BPR, DEWAN KOMISARIS TIDAK TERLIBAT DALAM HAL PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEGIATAN OPERASIONAL BPR KECUALI TERKAIT DENGAN PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	DEWAN KOMISARIS MEMASTIKAN BAHWA DIREKSI TELAH MENINDAKLANJUTI HASIL TEMUAN AUDIT BAIK INTERN ATAUPUN EKSTERN, PENGAWASAN OJK DAN PENGAWASAN OTORITAS LAINNYA
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS TELAH DILAKUKAN 4 KALI SELAMA TAHUN 2022 YANG DIHADIRI OLEH KEDUA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	KEPUTUSAN RAPAT DEWAN KOMISARIS TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN MUSYAWARAH MUFAKAT DAN TELAH MENCANTUMKAN DISSENTING OPINION DALAM HAL TERDAPAT PERBEDAAN PENDAPAT
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMANFAATKAN BPR UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI YANG DAPAT MERUGIKAN BPR SELAIN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN YANG TELAH DITETAPKAN RUPS
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS MELAKUKAN PEMANTAUAN TERHADAP LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,45	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	HASIL RAPAT DEWAN KOMISARIS TELAH DIBUATKAN NOTULEN DAN DIDOKUMENTASIKAN DENGAN BAIK DAN JELAS
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	TIDAK PUNYA
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	TIDAK PUNYA
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	TIDAK PUNYA
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	TIDAK PUNYA
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	TIDAK PUNYA
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR TELAH MEMILIKI KEBIJAKAN MENGENAI BENTURAN KEPENTINGAN
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	SELAMA PERIODE PELAPORAN TIDAK TERDAPAT BENTURAN KEPENTINGAN YANG DAPAT MERUGIKAN ATAU MENGURANGI KEUNTUNGAN BPR
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	TIDAK TERDAPAT BENTURAN KEPENTINGAN SELAMA TAHUN 2022 YANG DAPAT MERUGIKAN BPR
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	MODAL INTI BPR KURANG DARI Rp. 50 MILIAR DAN ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN TIDAK MENANGANI PENYALURAN KREDIT DAN PENGHIMPUNAN DANA
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN MEMAHAMI POJK DAN PERATURAN LAIN TERKAIT PERBANKAN
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	MODAL INTI BPR KURANG DARI Rp. 50 MILIAR, MEMILIKI PE KEPATUHAN YANG MENANGANI FUNGSI KEPATUHAN DAN INDEPENDEN TERHADAP FUNGSI OPERASIONAL
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	PE KEPATUHAN MENYUSUN DAN/ATAU MENKINIKAN PEDOMAN KERJA, SISTEM DAN PROSEDUR KEPATUHAN
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR MEMILIKI KETENTUAN MENGENAI TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PE KEPATUHAN
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN MEMASTIKAN BAHWA KEGIATAN USAHA BPR SUDAH MEMENUHI PERATURAN OJK DAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG RELEVAN TERMASUK KETEPATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEPADA PIHAK TERKAIT
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN SELALU BERUPAYA MENDORONG TERCIPTANYA BUDAYA KEPATUHAN BPR DAN MENGIKUTSERTAKAN PEGAWAI BPR DALAM SETIAP SOSIALISASI DAN PELATIHAN MENGENAI KETENTUAN TERKINI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PIHAK TERKAIT
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN MEMANTAU DAN TERUS MENGEVALUASI AGAR KEGIATAN USAHA BPR TIDAK MENYIMPANG DARI KETENTUAN YANG TELAH DIBUAT
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE KEPATUHAN MEMASTIKAN KEBIJAKAN, KETENTUAN, SISTEM DAN PROSEDUR SERTA KEGIATAN USAHA BPR TELAH SESUAI DENGAN POJK DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE KEPATUHAN MENKINIKAN DAN MASIH TERUS MENGEVALUASI KEBIJAKAN, SISTEM DAN PROSEDUR YANG DIMILIKI BPR AGAR SESUAI DENGAN KETENTUAN OJK DAN PERATURAN LAIN YANG RELEVAN
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,64	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	SELAMA PERIODE PELAPORAN, BELUM TERDAPAT PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN YANG DILAKUKAN OLEH BPR

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEPADA OJK SETIAP TAHUNNYA DAN MELAPORKAN PELANGGARAN KEPATUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BPR (BILA ADA) KEPADA DIREKTUR UTAMA DAN DEWAN KOMISARIS
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	SELAMA TAHUN 2022, TIDAK TERDAPAT KEBIJAKAN DIREKSI YANG MENYIMPANG DARI POJK ATAUPUN KETENTUAN LAIN YANG RELEVAN, NAMUN JIKA HAL TERSEBUT TERJADI, ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN AKAN MENYAMPAIKAN HAL TERSEBUT KEPADA OJK
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	MODAL INTI BPR KURANG DARI Rp. 50 MILIAR DAN BPR TELAH MEMILIKI PE AUDIT INTERN
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	PE AUDIT INTERN TELAH MEMILIKI PEDOMAN KERJA SERTA SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	PE AUDIT INTERN BERSIFAT INDEPENDEN TERHADAP SATUAN KERJA OPERASIONAL
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	PE AUDIT INTERN BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA DIREKTUR UTAMA
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI AUDIT INTERN DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN BPR
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DI BPR TELAH SESUAI DENGAN PEDOMAN AUDIT INTERN YANG TELAH DISUSUN OLEH BPR

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	MODAL INTI BPR KURANG DARI Rp. 50 MILIAR
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	PE AUDIT INTERN TELAH MELAKSANAKAN TUGASNYA SECARA MEMADAI DAN INDEPENDEN
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	TERKAIT PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN, BPR SELALU BERUSAHA MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN PEGAWAINYA MELALUI PELATIHAN YANG DIADAKAN OLEH OTORITAS BERWENANG
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PE AUDIT INTERN MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT KEPADA DIREKTUR UTAMA DAN KOMISARIS DENGAN TEMBUSAN KEPADA ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN POKOK HASIL AUDIT INTERN KEPADA OJK SETIAP TAHUN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	MODAL INTI BPR KURANG DARI Rp. 50 MILIAR
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	MODAL INTI BPR KURANG DARI Rp. 50 MILIAR DAN BPR TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PENGANGKATAN PE AUDIT INTERN KEPADA OJK
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	DALAM RANGKA PEMBERIAN PENUGASAN AUDIT KEPADA AKUNTAN PUBLIK DAN KAP, BPR TELAH MELAKSANAKANNYA SESUAI KETENTUAN ANTARA LAIN LEGALITAS PERJANJIAN KERJA, STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK, RUANG LINGKUP AUDIT DAN KOMUNIKASI ANTARA OJK DENGAN KAP YANG BERSANGKUTAN
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	AKUNTAN PUBLIK DAN KAP YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN BPR TELAH TERDAFTAR DI OJK SERTA TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN RUPS BERDASARKAN REKOMENDASI DARI DEWAN KOMISARIS
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR TELAH MELAPORKAN HASIL AUDIT KAP DAN MANAGEMENT LETTER KEPADA OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	LAPORAN HASIL AUDIT DAN MANAGEMENT LETTER YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH KAP KEPADA BPR TELAH MENGGAMBARAKAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI BPR DAN HAL TERSEBUT TELAH DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU OLEH KAP
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	CAKUPAN HASIL AUDIT BPR TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	MODAL INTI BPR KURANG DARI Rp. 50 MILIAR DAN MEMILIKI PE KEPATUHAN YANG MERANGKAP SEBAGAI PE MANAJEMEN RISIKO
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR MEMILIKI PEDOMAN STANDAR MENGENAI MANAJEMEN RISIKO
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	DALAM SETIAP KEBIJAKAN DAN PROSEDUR YANG DIBUAT, BPR SELALU MEMPERHITUNGGAN PENGELOLAAN TERHADAP RISIKO YANG KEMUNGKINAN TIMBUL
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	1	DIREKSI TELAH MENYUSUN KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SERTA MENGEVALUASI SEMUA TRANSAKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DIREKSI

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGAWASANNYA, DEWAN KOMISARIS SECARA BERKALA MENGEVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO DI BPR, MENGEVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG DIPANDANG PERLU DI SETIAP PERMOHONAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUANNYA
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR TERUS BERUPAYA UNTUK MELAKUKAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO TERHADAP FAKTOR RISIKO YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA KUALITATIF MAUPUN KUANTITATIF
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	BPR MENERAPKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG MENYELURUH DI SETIAP KEGIATAN USAHA BPR
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR MENERAPKAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO KREDIT, OPERASIONAL DAN KEPATUHAN SESUAI KETENTUAN OJK
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	SISTEM INFORMASI YANG DIMILIKI BPR MAMPU MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI YANG DIPERLUKAN WALAUPUN BELUM TERLALU SEMPURNA DAN MASIH MEMERLUKAN PENGEMBANGAN LEBIH LANJUT
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	PENGEMBANGAN BUDAYA MANAJEMEN RISIKO TERUS MENERUS DILAKUKAN DI SELURUH JENJANG ORGANISASI DAN BILA ADA PELATIHAN DAN/ATAU SOSIALISASI MENGENAI MANAJEMEN RISIKO, DIREKSI MENGIKUTSERTAKAN PEGAWAI DALAM KEGIATAN TERSEBUT GUNA MENINGKATKAN KOMPETENSI SDM BPR
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,43	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,57	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR TELAH MENYUSUN LAPORAN PROFIL RISIKO SETIAP SEMESTER DAN MELAPORKANNYA KEPADA OJK
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	SELAMA PERIODE PELAPORAN, BELUM TERDAPAT PRODUK DAN AKTIVITAS BARU BPR DAN BILA HAL TERSEBUT ADA, BPR AKAN MELAPORKANNYA KEPADA OJK
	Total nilai skala penerapan	3	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	KETENTUAN MENGENAI BMPK TERMASUK PEMBERIAN KREDIT KEPADA PIHAK TERKAIT, DEBITUR GRUP DAN/ATAU DEBITUR BESAR DIATUR DALAM PKPB BPR
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	KEBIJAKAN MENGENAI BMPK YANG DIMILIKI BPR TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN BPR SECARA BERKALA TERUS MENGEVALUASI SERTA MENKINIKAN KEBIJAKAN TERSEBUT AGAR SESUAI DENGAN KETENTUAN TERBARU
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	PROSES PEMBERIAN KREDIT BPR KEPADA PIHAK TERKAIT ATAUPUN PEMBERIAN KREDIT BESAR TELAH MEMENUHI KETENTUAN OJK MENGENAI BMPK DAN MEMPERHATIKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN SERTA PERATURAN LAIN YANG RELEVAN
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	LAPORAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA PIHAK TERKAIT DAN/ATAU PEMBERIAN KREDIT YANG MELANGGAR BMPK TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK SECARA RUTIN MELALUI APOLO OJK (LAPORAN BULANAN)
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	SELAMA TAHUN 2022 TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN BMPK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	DIREKSI TELAH MENYUSUN RENCANA BISNIS BPR SESUAI DENGAN VISI DAN MISI BPR YANG TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RENCANA BISNIS YANG TELAH DISUSUN MENGGAMBARAKAN RENCANA STRATEGIS BPR JANGKA PANJANG DAN STRATEGI PENYELESAIAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI BPR
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	RENCANA BISNIS YANG DISUSUN BPR TELAH DISAMPAIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN DIDUKUNG SEPENUHNYA OLEH PEMEGANG SAHAM
Total nilai skala penerapan		3	
Rata-rata		1,00	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	PENYUSUNAN RENCANA BISNIS BPR TELAH MEMPERTIMBANGKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN, PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN FAKTOR EKSTERNAL MAUPUN INTERNAL YANG DAPAT MEMPENGARUHI KELANGSUNGAN USAHA BPR
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	DEWAN KOMISARIS MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA BISNIS BPR SEBAGAI SALAH SATU BENTUK TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA TERHADAP KEGIATAN USAHA BPR
Total nilai skala penerapan		2	
Rata-rata		1,00	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RENCANA BISNIS TERMASUK PERUBAHANNYA DISAMPAIKAN KEPADA OJK MELALUI APOLO
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN YANG DIMILIKI BPR DAPAT MEMBANTU MENGHASILKAN LAPORAN KEUANGAN DAN NON KEUANGAN NAMUN MASIH MEMERLUKAN PENGEMBANGAN LEBIH LANJUT
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI SETIAP TRIWULANAN SESUAI KETENTUAN OJK
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	ISI LAPORAN TAHUNAN YANG DISUSUN BPR TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR MELAKSANAKAN TRANSPARANSI INFORMASI MENGENAI PRODUK, LAYANAN DAN/ATAU PENGGUNAAN DATA NASABAH DENGAN BERPEDOMAN PADA KETENTUAN OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN BPR SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI DISAMPAIKAN SECARA LENGKAP DAN TEPAT WAKTU KEPADA OJK SERTA SUDAH DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA MASSA DAN TELAH DITANDATANGANI OLEH DIREKSI
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	SELAMA TAHUN 2022, TIDAK TERDAPAT PENGADUAN DARI NASABAH DAN LAPORAN NIHIL MENGENAI PENANGANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN TELAH DILAPORKAN SECARA TEPAT WAKTU
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2022**

Nama BPR : PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri
Alamat : Jl. Jendral Sudirman 112 Amlapura
Modal Inti : Rp. 6.250.704.751,-
Total Aset : Rp. 20.883.294.470,-

Hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola BPR sepanjang tahun 2022 dikategorikan ke dalam peringkat 1 dan nilai komposit 1,2 dengan kesimpulan sebagai berikut :


1. Manajemen BPR telah melaksanakan tata kelola secara umum dengan baik, yang mana hal tersebut tercermin dari pemenuhan 11 faktor tata kelola
2. Struktur tata kelola sudah lengkap dan memadai
3. Proses tata kelola pada sebagian besar faktor sudah baik karena didukung oleh struktur tata kelola yang lengkap
4. Hasil tata kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien

Apabila terdapat kekurangan, maka hal tersebut bersifat tidak signifikan dan akan terus menjadi perhatian untuk dikoreksi pada masa mendatang.

Amlapura, 16 Januari 2023


I Made Sumatra
Komisaris Utama




I Putu Darmawan
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505986-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601852-24012023081301

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

bprbaliartha@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-24 08:13:01



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.